



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Perencanaan Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango

Analysis of the Bulango Ulu Dam Development Planning in Bone Bolango Regency

Siti Nurcahyati Abdussamad¹, Zuchri Abdussamad²

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: sitinurcahyatiabd@ung.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Apr, 2026

Revised: 11 May, 2026

Accepted: 04 Jun, 2026

Kata Kunci: Perencanaan pembangunan, Pembangunan infrastruktur, Kebijakan publik, Pembangunan daerah

Keywords:

Development planning, Infrastructure development, Public policy, Regional development

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11082](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11082)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango dalam perspektif kebijakan publik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan artikel terkait pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Efektivitas perencanaan dipengaruhi oleh faktor politik, administrasi, serta sosial ekonomi masyarakat. Dukungan kebijakan, koordinasi antarinstitusi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

ABSTRACT

This study analyzes the planning of the Bulango Ulu Dam development in Bone Bolango Regency from a public policy perspective and identifies the factors influencing its planning effectiveness. The study employs a qualitative approach through documentation studies and literature reviews, including scientific journals, policy documents, government reports, and articles related to infrastructure development. The results show that the planning process of the Bulango Ulu Dam involves stages of problem identification, agenda setting, policy formulation, implementation, and evaluation. The effectiveness of the planning is influenced by political, administrative, and socio-economic factors. Policy support, inter-agency coordination, institutional capacity, and community participation are important factors in supporting successful development. This study emphasizes the importance of integrated, participatory, and sustainable planning in regional infrastructure development.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan fasilitas publik lainnya guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air adalah pembangunan bendungan. Bendungan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, tetapi juga berkembang menjadi infrastruktur multifungsi yang mendukung kebutuhan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, pembangkit listrik, serta peningkatan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pembangunan bendungan menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya air namun rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Salah satu proyek pembangunan infrastruktur strategis tersebut adalah Bendungan Bulango Ulu yang berlokasi di kawasan Sungai Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bendungan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendukung penguatan ketahanan air dan pangan di kawasan Indonesia Timur. Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung total sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volume efektif sebesar 58,61 juta meter kubik. Selain itu, bendungan ini direncanakan mampu melayani irigasi seluas ± 4.193 hektar, menyediakan air baku sebesar 2.200 liter/detik, mendukung pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 4,95 MW, serta menjadi sarana pariwisata dan olahraga air (Pandjab et al., 2025).

Pembangunan Bendungan Bulango Ulu menjadi penting karena wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulango sering mengalami banjir pada musim hujan yang berdampak pada kawasan permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur publik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya air yang lebih terencana dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya kebutuhan terhadap air baku dan irigasi juga menjadi faktor penting yang mendorong pembangunan bendungan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan Bendungan Bulango Ulu tidak hanya dipahami sebagai proyek infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor dan tahapan perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan bendungan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, sektor swasta, dan masyarakat guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif. Keberhasilan pembangunan proyek semacam ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen proyek, efisiensi penggunaan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan (Cahya, 2024).

Perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastruktur berskala besar yang menuntut adanya transparansi, koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti persoalan administrasi, pembebasan lahan, dinamika sosial masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang memerlukan penanganan secara terintegrasi. Oleh karena itu, efektivitas perencanaan menjadi faktor penting dalam menentukan

keberhasilan pembangunan bendungan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dalam perspektif kebijakan publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perencanaan

Perencanaan merupakan proses penting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan, arah kebijakan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dalam administrasi publik, perencanaan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan.

Menurut Waterston, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi, dan dilakukan secara terus-menerus untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Davidoff menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses rasional untuk menentukan masa depan melalui urutan pilihan. Friedman juga memandang perencanaan sebagai strategi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan dan implementasi kebijakan pembangunan (Ashari et al., 2015).

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan *top-down* maupun *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menunjukkan bahwa arah pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan nasional, sedangkan pendekatan *bottom-up* menekankan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan pembangunan. Sejalan dengan pendapat (Ashari et al., 2015) perencanaan daerah dapat dipahami sebagai penjabaran dari perencanaan nasional sekaligus sebagai proses daerah dalam merumuskan kepentingan lokal.

Pada pembangunan Bendungan Bulango Ulu, proses perencanaan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan infrastruktur nasional yang bertujuan mendukung ketahanan air, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bendungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis konstruksi, tetapi juga melibatkan koordinasi antarinstansi, pengelolaan sumber daya, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan

Keberhasilan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Conyers dan Hills, perencanaan pembangunan tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks politik, administrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Aisyah et al., 2012). Faktor-faktor tersebut menentukan apakah suatu rencana pembangunan dapat disusun secara realistis, diterima oleh pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara efektif.

Faktor Politik

Faktor politik menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan arah dan keberhasilan perencanaan pembangunan. Stabilitas politik, dukungan pemerintah, kepentingan elite, serta komitmen pemimpin terhadap pembangunan sangat memengaruhi penetapan kebijakan dan prioritas pembangunan. Dukungan politik juga menentukan alokasi anggaran, legitimasi kebijakan, serta keberlanjutan program pembangunan. Dalam proyek pembangunan infrastruktur berskala besar, keputusan politik sangat diperlukan agar proses pembangunan memperoleh dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor

Faktor Administrasi

Faktor administrasi berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas birokrasi dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Keberhasilan perencanaan membutuhkan organisasi yang memiliki kemampuan teknis, sistem administrasi yang baik, serta dukungan data dan informasi yang akurat. Koordinasi yang lemah dan prosedur birokrasi yang berbelit dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan (Sartika, 2024)

Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan. Kondisi sosial masyarakat, tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, serta penerimaan masyarakat terhadap pembangunan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Perencanaan yang tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan konflik, penolakan, serta ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus direncanakan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan tersebut (Hardiyanti et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dalam perspektif kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses perencanaan pembangunan, tahapan kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, kebijakan, serta dinamika yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta artikel yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya air. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, tahapan kebijakan publik, serta faktor politik, administrasi, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Bendungan Bulango Ulu dalam Kerangka Kebijakan Publik

Pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu bentuk pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, penyediaan air baku, peningkatan irigasi pertanian, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Sebagai proyek infrastruktur berskala besar, pembangunan bendungan ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis konstruksi, tetapi juga sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang melibatkan berbagai tahapan perencanaan dan koordinasi antaraktor.

Dalam perspektif teori perencanaan, Waterston menyatakan bahwa perencanaan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi, dan berkelanjutan untuk memilih alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tertentu (Ashari et al., 2015). Konsep tersebut terlihat pada pembangunan

Bendungan Bulango Ulu yang dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan peningkatan irigasi pertanian. Perencanaan pembangunan bendungan dilakukan secara sistematis melalui berbagai kajian teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Selain itu, Davidoff menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses rasional dalam menentukan pilihan-pilihan pembangunan di masa depan (Ashari et al., 2015). Hal ini tercermin dalam penetapan Bendungan Bulango Ulu sebagai Proyek Strategis Nasional yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan daerah terhadap pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan. Pemerintah melakukan berbagai kajian kelayakan dan analisis kebutuhan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan bendungan.

Berdasarkan kerangka kebijakan publik, proses perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu juga sejalan dengan tahapan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dimulai dari proses identifikasi masalah yang muncul di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulango sebagai bagian dari mekanisme kebijakan publik. Masyarakat serta pemerintah daerah secara konsisten mengangkat persoalan banjir yang berulang setiap tahun sebagai isu utama yang berdampak luas terhadap permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur publik. Bulango Ulu merupakan suatu daerah yang letaknya wilayah berada di pegunungan di kabupaten Bone Bolango, daerah ini menjadi langganan banjir pada musim hujan tiba, dan jika daerah ini mengalami banjir maka luapan air di daerah ini akan berdampak di daerah perkotaan seperti andalas dan sekitarnya (Lubis, 2019).

2. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda pembangunan Bendungan Bulango Ulu dimulai dari identifikasi masalah banjir dan kebutuhan air baku di DAS Bulango, yang kemudian diangkat sebagai prioritas melalui mekanisme perencanaan daerah seperti Musrenbang dan dimasukkan dalam RKPD serta RPJMD Kabupaten Bone Bolango. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menegaskan isu pengendalian banjir dan ketahanan air sebagai sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi. Selanjutnya, isu ini naik ke tingkat nasional melalui Bappenas dan Kementerian PUPR, yang memasukkan Bendungan Bulango Ulu ke dalam RPJMN 2020–2024 sebagai proyek prioritas ketahanan air. Proyek ini juga ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2020, sehingga memperoleh dukungan regulasi dan pendanaan khusus. Proses agenda setting tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bendungan ini merupakan isu kebijakan lintas tingkat pemerintahan, dari desa hingga nasional, yang memberikan legitimasi politik dan publik yang kuat bagi pelaksanaannya. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2020)

3. Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi kebijakan dalam perencanaan Bendungan Bulango Ulu dilakukan melalui proses analisis yang sistematis, dimulai dari penyusunan kajian teknis, analisis lingkungan, hingga penetapan pilihan kebijakan terbaik. Kajian teknis berupa *feasibility study* dan analisis hidrologi disusun oleh konsultan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II untuk memastikan kelayakan lokasi dan kebutuhan pengendalian banjir serta penyediaan air baku. Informasi mengenai kebutuhan irigasi dan potensi manfaat bendungan didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nani et al., 2024) menyatakan bahwa wilayah Bulango membutuhkan dukungan infrastruktur air untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan layanan publik. formulasi kebijakan ditandai dengan penetapan Bendungan Bulango Ulu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tercantum dalam situs resmi KPPIP yang menyatakan bahwa bendungan ini termasuk dalam daftar proyek prioritas Indonesia untuk ketahanan air dan

pangan.

4. Implementasi

Implementasi kebijakan pembangunan Bendungan Bulango Ulu melibatkan koordinasi lintas aktor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sebagai pelaksana konstruksi. Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air dan BWS Sulawesi II memimpin pelaksanaan teknis di lapangan serta memastikan mutu dan progres konstruksi sesuai standar. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab atas pembebasan lahan, relokasi penduduk, serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses ganti rugi yang sesuai aturan. Sementara itu, pelaksanaan fisik proyek ditangani kontraktor nasional termasuk BUMN seperti Hutama Karya dan WIKA yang mengerjakan struktur utama bendungan dan fasilitas pendukung. Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan bendungan ini sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi antar-aktor, komunikasi yang solid, serta penyelesaian hambatan teknis, administratif, dan sosial selama proses berlangsung.

5. Evaluasi

Evaluasi kebijakan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dilakukan secara berkala oleh sejumlah lembaga penting, antara lain Kementerian PUPR, Bappenas, Inspektorat Jenderal,

pemerintah daerah, dan potensi lembaga pengawas independen. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan bahwa pembangunan bendungan tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga dapat mewujudkan manfaat kebijakan publik yang telah ditargetkan. Salah satu indikator evaluasi fisik adalah pengurangan risiko banjir di hilir DAS Bulango.

Secara keseluruhan, pembangunan Bendungan Bulango Ulu menunjukkan bagaimana kebijakan publik dijalankan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi, dengan tujuan akhir mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Gorontalo

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Pembangunan Bendungan Bulango Ulu

Efektivitas perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor politik, faktor administrasi, serta faktor sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Conyers dan Hills yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks politik, kapasitas administrasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan bendungan perlu dianalisis secara menyeluruh karena proyek ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kebijakan, kelembagaan, dan masyarakat terdampak.

Faktor Politik

Faktor politik memiliki peran penting dalam menentukan arah, prioritas, dan keberlanjutan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Dalam pembangunan infrastruktur berskala besar, dukungan politik diperlukan untuk menetapkan proyek sebagai prioritas pembangunan, menyediakan anggaran, memperkuat regulasi, serta membangun koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan Bendungan Bulango Ulu sebagai Proyek Strategis Nasional menunjukkan adanya legitimasi politik yang kuat dalam mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Hudon & Floricel, 2023) yang menjelaskan bahwa pembangunan

infrastruktur publik berskala besar jarang berjalan sebagai proses teknis yang sederhana, karena sering dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan aktor, dan proses kebijakan publik. Oleh karena itu, keberhasilan perencanaan Bendungan Bulango Ulu sangat bergantung pada konsistensi dukungan politik dari berbagai tingkat pemerintahan. Dukungan politik yang kuat dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan pendanaan, sedangkan perubahan prioritas kebijakan atau pergantian kepemimpinan dapat memengaruhi kesinambungan Pembangunan.

Faktor Administrasi

Faktor administrasi berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan data, serta kejelasan prosedur dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan Bendungan Bulango Ulu melibatkan berbagai aktor, seperti Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kontraktor pelaksana, serta masyarakat terdampak. Banyaknya aktor yang terlibat menuntut adanya sistem administrasi yang kuat agar proses perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan efektif.

Menurut Conyers dan Hills, keberhasilan perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan administratif lembaga yang terlibat dalam proses pembangunan. Perencanaan yang baik membutuhkan organisasi yang memiliki kemampuan teknis, sistem birokrasi yang jelas, serta koordinasi yang efektif antarinstansi (Aisyah et al., 2012). Dalam konteks pembangunan Bendungan Bulango Ulu, koordinasi administratif menjadi penting karena proyek ini melibatkan proses penyusunan dokumen teknis, pengelolaan anggaran, pembebasan lahan, serta pengawasan pembangunan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Berdasarkan (World Bank, 2020) menjelaskan bahwa tata kelola infrastruktur mencakup seluruh siklus proyek, mulai dari pemilihan proyek, desain, pengadaan, hingga implementasi. Tata kelola tersebut juga harus memperhatikan transparansi, integritas, serta pengelolaan risiko sosial dan lingkungan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Pandangan tersebut relevan dengan pembangunan Bendungan Bulango Ulu karena proyek bendungan membutuhkan tata kelola administrasi yang terstruktur untuk menghindari keterlambatan pembangunan, tumpang tindih kewenangan, serta hambatan birokrasi yang dapat memengaruhi efektivitas perencanaan.

Selain itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perencanaan Bendungan Bulango Ulu tidak hanya difokuskan pada fungsi irigasi dan pengendalian banjir, tetapi juga diarahkan pada pengembangan energi terbarukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi II melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan terkait evaluasi pengembangan PLTM dan PLTS terapung di Bendungan Bulango Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi administrasi dan kelembagaan terus dibutuhkan dalam pengembangan proyek agar perencanaan pembangunan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang lebih luas (Kementerian PUPR, 2025).

Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan efektivitas perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik proyek, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, serta dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dalam konteks pembangunan bendungan, masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan lahan, sumber daya air, dan aktivitas pertanian sehingga pembangunan dapat memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang cukup besar.

Menurut Conyers dan Hills, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat harus menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat diterima oleh publik (Aisyah et al., 2012). Dalam pembangunan Bendungan Bulango Ulu, masyarakat sekitar sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan pemanfaatan lahan, sehingga pembangunan bendungan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian melalui

penyediaan irigasi dan pengendalian banjir. Selain itu, pembangunan bendungan juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan pariwisata, penyediaan air baku, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Namun demikian, pembangunan bendungan juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial, seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, perubahan mata pencaharian, serta penyesuaian terhadap lingkungan baru. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan. Pendapat (Hardiyanti et al., 2021) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan mampu meminimalkan potensi konflik sosial.

Selain itu, (World Bank, 2021) melalui *Environmental and Social Framework* menegaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan perlindungan sosial dan pengelolaan dampak lingkungan guna memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Pengelolaan dampak sosial penting dilakukan untuk melindungi masyarakat terdampak sekaligus meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks Bendungan Bulango Ulu, perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi menjadi penting agar pembangunan bendungan tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan mendukung pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi pertanian, serta ketahanan air dan pangan di Provinsi Gorontalo. Dalam perspektif kebijakan publik, perencanaan pembangunan bendungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis konstruksi, tetapi juga melibatkan proses pengambilan keputusan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas perencanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu dipengaruhi oleh faktor politik yang berkaitan dengan dukungan kebijakan dan legitimasi pembangunan, faktor administrasi yang mencakup kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat, pembebasan lahan, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pembangunan Bendungan Bulango Ulu memerlukan perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Aisyah, S., Gani, A. J. A., & Muluk, M. R. K. (2012). Perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat di Kota Surabaya. *Wacana*, 15(3), 42–50.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara: Studi kasus perencanaan partisipatif tahun 2009–2013. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(2), 164–180.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*.
- Cahya, E. R. S. P. T. J. E. N. (2024). STUDI MANAJEMEN PROYEK PEMBANGUNAN MAIN DAM PADA BENDUNGAN BULANGO ULU DENGAN METODE FASTTRACK DAN CRASHING. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 4(1), 9–15.
- Hardiyanti, S., Asrinaldi, & Zetra, A. (2021). Partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Tenam Jambi. *Niara*, 4(1), 276–283.
- Hermanto, Z., & Suryanto, J. (2016). Pilkada dan sinergi perencanaan pembangunan antar pemerintah

-
- daerah: Peran gubernur yang nyata tapi tak kentara. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, 8(2), 31–38.
- Hudon, M., & Floricel, S. (2023). Governance and megaprojects: Understanding political dynamics in public infrastructure projects. *Policy and Society*, 42(2), 148–163.
- Lubis, S. (2019). *Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna*. 1–23.
- Nani, E. T., Labdul, B. Y., & Husnan, R. (2024). Model Pola Operasi Waduk Bulango Ulu. *Composite Journal*, 4(2), 43–47.
- Pandjab, N. R., Labdul, B. Y., & Husnan, R. (2025). EVALUASI PERENCANAAN TEMPORARY COFFERDAM HULU PADA BENDUNGAN BULANGO ULU. *Jurnal Teknik Sumber Daya Air*, 5(1), 51–64.
- Sartika, I. (2024). Collaborative governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 209–233.
- World Bank. (2020). *Infrastructure governance framework*.
- World Bank. (2021). *Environmental and social framework*.